

NAMA : NURHAYATI

NPM : 2226061005

TUGAS 3 ANALISIS KEBIJAKAN

1. Buatlah definisi operasional dari contoh kasus berikut, lengkapi dengan diagram pohon atau fishbone untuk pemetaan masalah & penentuan kebijakannya:

Jawab :

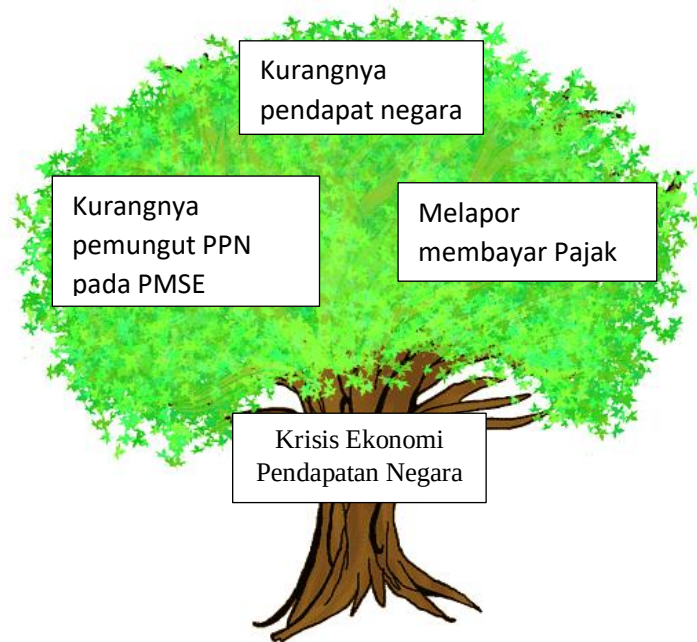
Kebijakan terkait Pajak PMSE (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) dilatarbelakangi oleh meningkatnya transaksi perdagangan melalui sistem elektronik atau e-commerce atau yang lebih dikenal masyarakat sebagai transaksi belanja online. Pemerintah Indonesia mulai mengenakan pajak yang berasal dari transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Pengenaan pajak PMSE dilakukan melalui Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 yang diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 mengatur tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan negara.

Pengenaan pajak PMSE yang dilakukan Pemerintah Indonesia berupa pengenaan pajak pertambahan nilai atau PPN atas pemanfaatan jasa kena pajak (JKP) dan/atau barang kena pajak tidak berwujud (BKPTB) dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean dengan melalui PMSE. Selain itu, terdapat pula pengenaan pajak penghasilan atau PPh atas kegiatan PMSE yang dilakukan oleh subjek pajak luar negeri dengan memperhatikan ketentuan kehadiran ekonomi signifikan.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-12/PJ/2020 menetapkan ketentuan dan tata cara pelaksanaan pemungutan PPN pada transaksi PMSE oleh pemungut PPN, termasuk Amazon.com.ca, Inc, Image Future Investment (HK) Limited, Dropbox International Unlimited Company, Freepik Company S.L, serta perusahaan digital lainnya yang telah ditunjuk sebagai pemungut PPN. Dalam pelaksanaannya, perusahaan-perusahaan digital tersebut diharapkan mematuhi ketentuan dan tata cara yang telah diatur oleh DJP untuk

memastikan efektivitas pemungutan PPN pada transaksi PMSE dan mendukung stabilitas perekonomian nasional.

- Diagram Pohon



- Tidak adanya pengawasan pemungutan PPN pada PMSE
- Meningkatnya transaksi perdagangan melalui sistem elektronik
- Kurangnya melapor dan membayar pajak pada Negara

- Dari pemetaan masalah diatas, kebijakan yang dapat dilakukan memperbaiki masalah, Menunjuk perusahaan digital sebagai pemungut PPN pada transaksi PMSE untuk Meningkatkan pengawasan dan pengenaan pajak pada perusahaan digital, dan Mendorong kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak.

2. Silahkan pilih salah satu kasus dibawah ini dan berikan analisis saudara, sesuai dengan teori yang sudah anda pelajari :

Pada Kasus C

- c. Kebijakan sosial di Indonesia terkait kemiskinan telah diatur dalam bentuk-bentuk kebijakan dalam hal ini berupa aturan-aturan yang tercantum pada Undang-undang No. 13 Tahun 2011 Tentang Penangan Kemiskinan yang secara eksplisit digambarkan pada batang tubuh undang-undang tersebut yakni upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan,

program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Peraturan mengenai kemiskinan tersebut dapat dipahami tidak terlepas dari makna dari kebijakan sosial yang merupakan tindakan yang ditempuh pemerintah dalam kaitannya pengurangan dan penanganan kemiskinan yang ditujukan untuk berbagai hal dalam hal menjaga, melindungi, dan memberdayakan masyarakat.

Jawab :

Analisis kebijakan :

Kemiskinan merupakan masalah kompleks dan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi tetapi juga kegagalan memenuhi hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Kemiskinan terjadi karena ketidakberdayaan masyarakat untuk keluar dari permasalahan kemiskinan yang dihadapinya. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah sangat penting dikemukakan sebagai bagian terpenting dari berbagai strategi kebijakan yang dilaksanakan oleh daerah. Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan.

Proses analisis kebijakan publik menurut Dunn (2000) adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktivitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan, dan divisualisasikan sebagai rangkaian tahap yang saling bergantung dan diatur menurut urutan waktu, yang meliputi penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Sementara itu, aktivitas intelektual meliputi perumusan masalah, forecasting, rekomendasi kebijakan, monitoring, dan evaluasi kebijakan.

Pada dasarnya pengentasan kemiskinan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi diperlukan juga kesadaran dan kemauan yang kuat serta tanggung jawab dari masyarakat miskin itu sendiri untuk berupaya bagaimana meningkatkan pendapatan. Pemerintah telah banyak merumuskan program-program pengentasan kemiskinan, namun

diperlukan merumuskan kembali sasaran kebijakan strategis apa untuk mempercepat penurunan kemiskinan.

3. Apakah penerapan kebijakan THR 2023 sudah sesuai dengan Surat Edaran (SE) Nomor M/2/HK.04.00/III/2023 dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 15 tahun 2023. Berikan analisa dan solusi rekomendasi komprehensif agar kebijakan tersebut dapat efektif dan efisien?

Jawab :

Surat Edaran (SE) Nomor M/2/HK.04.00/III/2023 Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2023 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Menaker menjelaskan, THR keagamaan diberikan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih, baik yang mempunyai hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT), perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), termasuk pekerja/buruh harian lepas yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.

Analisa dan solusi rekomendasi komprehensif agar kebijakan tersebut dapat efektif dan efisien:

1. Pemerintah harus melakukan evaluasi mengenai kebijakan Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2023 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
2. Sanksi hukum harus ditegakkan untuk menertibkan perusahaan-perusahaan yang tidak menjalankan kebijakan yang ada sehingga dapat memberikan keadilan.
3. Peraturan yang lebih spesifik terkait dengan Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2023 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Diharapkan kebijakan THR dapat dijalankan dengan lebih efektif dan efisien, sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal baik bagi karyawan maupun perusahaan.